

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah terjadinya permasalahan pandemi covid-19 menyerang selama beberapa tahun belakangan ini, perekonomian di Indonesia telah mengalami pemulihan. Perkembangan ekonomi secara nasional pada triwulan ketiga tahun 2022 sebanyak 5,72%. Perbandingan antara perkembangan ekonomi pada triwulan ketiga tahun 2022 sebesar 1,8% menunjukkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat (KLI, 2022). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan terdapat 17 sektor yang diidentifikasi bisa mendorong pemulihan perekonomian di Indonesia. Salah satu dari 17 sektor yang diidentifikasi bisa mendorong pemulihan perekonomian di Indonesia yakni jasa keuangan (Anggraeni, 2020).

Jasa keuangan yakni suatu penamaan yang dipakai untuk menunjukkan jasa yang disediakan oleh sebuah industri keuangan. Adapun ruang lingkup dari jasa keuangan meliputi industri perbankan, industri non bank, dan industri pasar modal (Putri, 2021). BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) ialah jenis industri perbankan yang mempunyai peran terhadap pemulihan perekonomian nasional. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menyebar hingga daerah-daerah terpencil yang mempermudah akses keuangan terhadap kehidupan masyarakat.

Pada Pasal 1 undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang membicarakan soal perbankan menjelaskan “Bank merupakan lembaga keuangan bertugas

mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan ke masyarakat berupa kredit bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat”. Termasuk kedalam sebuah entitas bank seharusnya dapat bertahan dalam jangka panjang. Ketika menjalankan operasional perusahaan, setiap entitas akan selalu berkaitan dengan akuntansi. Perlakuan akuntansi tersebut memakai sebuah indikator yang bernama Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penggunaan SAK bertujuan sebagai bentuk keseragaman, sebagai acuan, dan sebagai tolak ukur kinerja suatu entitas.

Standar akuntansi keuangan yang berlaku di BPRS adalah PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan dan PSAK Syariah. Dengan diberlakukannya PSAK No.50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No.55 (Revisi 2011) terkait Instrumen Keuangan: Pengakuan, Pengukuran, dan PSAK No.60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang menggantikan PSAK No.31, maka PSAK No.31 menjadi tidak berlaku. PSAK No.60 mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2012. Karena PSAK tersebut tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPRS, sehingga diperlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai bagi BPRS. Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau bisa disebut SAK ETAP. DSAK-IAI dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan termasuk BPRS, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka standar akuntansi keuangan bagi BPRS

menggunakan SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2015).

Entitas yang termasuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik menerapkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk membuat laporan keuangannya. ETAP yakni suatu entitas di mana keberadaannya tidak mempunyai akuntabilitas publik yang bersifat signifikan dan menerbitkan laporan keuangannya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (IAI, SAK ETAP, 2023). SAK ETAP berupaya memberikan keleluasaan dalam penerapannya dan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses pendanaan oleh bank. SAK ETAP ialah SAK yang bersifat independen yang artinya tidak berpedoman pada SAK lain (SAK Umum) dan berdiri secara mandiri.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia BPRS yang disebut PAPSI BPRS merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRS. Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam PAPSI BPRS untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, BPRS tetap berpedoman kepada SAK ETAP beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (OJK, 2015).

Standar Akuntansi Syariah (SAS) merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dibuat khusus untuk entitas syariah dan entitas non-syariah yang melaksanakan transaksi sesuai dengan syariah (IAI,

2023). Konsep dasar SAK Syariah berasal dari konsep akuntansi secara umum, yang sudah diselaraskan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Penyelarasan ini digambarkan oleh Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), yang berfungsi menjadi landasan untuk pengembangan peraturan akuntansi keuangan syariah. SAS mengatur banyak hal, termasuk transaksi syariah yang berlaku bagi pihak-pihak yang melakukannya. Aturan akuntansi keuangan syariah mengatur transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, istishna, musyarakah, ijarah, salam, tabarru', sukuk, zakat, wa'ad, dan wakaf. Konsep SAK yang secara umum, digunakan untuk mengembangkan SAS, tetapi menggunakan pendekatan berbasis syariah yang didasarkan pada fatwa MUI.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pada setiap tahun terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) yang mengalami kebangkrutan. Hal tersebut dijelaskan oleh Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada saat konferensi pers, 26 Mei 2023. Kebangkrutan tersebut terjadi bukan karena ekonomi yang memburuk. Melainkan karena fraud atau pemalsuan penyajian laporan keuangan pada BPR (Ramli, 2023). Sejak Januari 2021 sampai Juni 2023 terdapat 10 BPR dan BPRS yang mengalami likuidasi. Dari sepuluh BPR dan BPRS yang mengalami likuidasi, lima diantaranya masih dalam proses likuidasi dan lima diantaranya sudah selesai proses likuidasi (LPS, 2023). Adapun perusahaan yang mengalami likuidasi pada tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar BPR dan BPRS yang Mengalami Likuidasi

No	Nama Bank Dalam Likuidasi	Wilayah	Tanggal CIU	Posisi
1	PT BPR Bagong Inti Marga	Jawa Timur	03 Februari 2023	Proses Likuidasi
2	PT BPR Pasar Umum	Bali	25 November 2022	Proses Likuidasi
3	PT BPRS Asri Madani Nusantara	Jawa Timur	15 September 2021	Proses Likuidasi
4	PT BPR Utomo Widodo	Jawa Timur	12 Agustus 2021	Proses Likuidasi
5	PT BPR Sumber Usahawan Bersama	Jawa Timur	02 Juli 2021	Selesai Likuidasi
6	PT BPR Bina Barumun	Sumatera Utara	03 Mei 2021	Selesai Likuidasi
7	LPN BPR Tapan	Sumatera Barat	07 April 2021	Selesai Likuidasi
8	PT BPR Sewu Bali	Bali	02 Maret 2021	Proses Likuidasi
9	Koperasi BPR Abang Pasar	Sulawesi Selatan	11 Februari 2021	Selesai Likuidasi
10	Koperasi BPR Tawang Alun	Jawa Timur	07 Januari 2021	Selesai Likuidasi

Sumber : www.lps.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa sebanyak sembilan BPR dan satu BPRS yang mengalami likuidasi. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja keuangan pada BPRS lebih baik dari pada BPR. Kinerja keuangan yang baik tercermin dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga dapat dijadikan media untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan serta merupakan sarana informasi bagi pemakai dan proses pengambilan keputusan (Prasasti, 2019).

Didalam laporan keuangan, aset tetap merupakan salah satu aspek pada akuntansi yang memiliki nilai signifikan. Dibandingkan dengan pos-pos lain

yang ada di neraca. Aset tetap yakni sebuah aset dipakai ketika terjadi pengoperasionalan entitas dan terdapat nilai yang relatif tinggi di mana aset tetap ini berlaku dalam jangka panjang. Dalam hal tujuan entitas, jumlah uang yang diinvestasikan untuk operasional entitas, aset tetap mempunyai fungsi penting dalam kelancaran perusahaan dalam mewujudkannya. Untuk mengoptimalkan peran ini, pengelolaan aset tetap harus mengikuti kebijakan yang sesuai. Oleh karena itu, mengelola aset tetap sangat penting. mengklasifikasikan, mengakui, mengukur, menyajikan, melaporkan, menghitung penyusutan, dan mengakhiri aset tetap adalah semua metode untuk mengelola aset tetap (Avivah, 2018).

(IAI, 2023) SAK ETAP yang mengatur tentang aset tetap terdapat pada BAB 15. SAK tersebut di gunakan dalam membantu pemakai laporan keuangan untuk mengerti segala informasi dan perubahan yang ada pada investasi aset tetap entitas. Akuntansi aset tetap memiliki sebuah tantangan utama di dalamnya di mana itu berupa pengakuan aset ketika saatnya telah tiba, menentukan jumlah tercatatnya, pengeluaran yang dilakukan untuk penyusutan aset, dan kerugian yang dikarenakan adanya penurunan dari nilai aset tetap. Entitas wajib melakukan pengelolaan aset berdasarkan SAK ETAP BAB 15 agar laporan keuangan selanjutnya tidak bias dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan.

Menurut (Avivah, 2018) menyatakan bahwa, hasil dari riset yang dilakukan di PT. BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo bahwa perlakuan aset tetap yang dilakukan, masih terdapat beberapa perlakuan aset tetap yang belum

sesuai dengan SAK ETAP BAB 15. Adapun perlakuan aset tetap yang belum sesuai terdapat pada pengukuran saat pengakuan aset tetap. Pada PT. BPRS Al-Mabrur terdapat transaksi pembelian aset tetap yang pengukuran saat pengakuan aset tersebut tidak memasukkan biaya-biaya tambahan hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan.

Didukung dengan riset (Hutagalung, 2020) pada Bank Syariah Mandiri KCP Marelan dan diperoleh hasil bahwa perlakuan akuntansi aset tetap, masih ada beberapa tidak sesuai dengan kaidah perlakuan akuntansi dan penyajian aset tetap pada laporan keuangan. Aktiva tetap yang mengalami penyusutan di Bank Syariah Mandiri KCP Marelan tidak memiliki nilai residu atau nol. Hal tersebut bertentangan dengan PSAK No. 16 2009 yang menyatakan bahwa penyusutan diakui walaupun nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya.

Didukung dengan riset (Hasanudin, dkk, 2021) dengan hasil bahwa koperasi melaksanakan perlakuan aset tetap dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Koperasi HMS mengukur pendapatan aset tetapnya dengan menghitung harga perolehan dan biaya yang berkaitan secara langsung saat mendapatkan aset dengan cara ditambahkan. Koperasi HMS melakukan penyusutan berdasarkan pada SAK ETAP memakai teknik garis lurus. Karena Koperasi HMS belum pernah menerapkan penghentian pengakuan aset tetap, maka peneliti tidak dapat menganalisis penghentian pengakuan aset tetap. Koperasi HMS juga mengungkapkan nilai aset tetap yang tercantum dalam

laporan neracanya berdasarkan pada harga perolehan dan penyusutan aset tetap.

Riset ini merupakan replika dari riset (Avivah, 2018). Perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya adalah obyek penelitian dan waktu penelitian. Pada (Avivah, 2018) menggunakan objek penelitian pada PT BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo dengan periode waktu riset pada tahun 2016. Sedangkan riset ini menggunakan objek penelitian di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dengan periode riset tahun 2022. Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang sudah dijabarkan, peneliti hendak melaksanakan sebuah riset berjudul **"Analisis Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP BAB 15 Pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera"**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penggambaran latar belakang permasalahan, maka perumusan masalah dalam riset ini yakni:

- 1.2.1 Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera?
- 1.2.2 Apakah penerapan akuntansi aset tetap pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera sudah sesuai dengan SAK ETAP BAB 15?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera

1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada
PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera dengan SAK ETAP BAB 15

1.4 Manfaat Penelitian

a. Akademis

Bisa dijadikan sebagai pelengkap ilmu pengetahuan soal pengelolaan aset tetap dan referensi untuk mahasiswa.

b. Objek

Hasil riset ini dapat digunakan sebagai sumber evaluasi dan saran untuk meningkatkan manajemen aset tetap organisasi.

c. Bagi Peneliti

Riset ini memiliki potensi untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan aset tetap. Di lain sisi, riset ini juga bisa dipakai menjadi sumber rujukan bagi riset lain yang serupa.

